

Analisis Kerjasama Pertahanan Australia – Timor-Leste Terkait Intensitas Kekuatan China di Laut Timor

Augusto Soares

Program Studi Magister Hubungan Internasional, Fisip, Universitas Katolik Parahyangan

Corresponding Author: Augusto Soares

Email: 8092001011@student.unpar.ac.id

Received: 12 Desember 2022 | Revised: 07 September 2023 | Accepted: 14 September 2023

Abstract: *Over the past decade, Australia and China have had tensions in their relationship, and added to this, China's closeness to Timor-Leste in the security sector, especially maritime security in the Timor Sea. This raises concerns for Australia that China will become a threat to both countries and has the potential to become a Sea Power in the future that can disrupt security and stability both in the region and globally. Furthermore, this problem is the subject of this research to see how the DCP cooperation between the two countries has on the intensity of China's power in the Timor Sea. This study aims to determine the Defense Cooperation Program (DCP) that was carried out between Australia and Timor-Leste regarding the intensity of China's power in the Timor Sea for the 2013-2022 period. The research conducted is explanatory research, which wants to explain the DCP that has been developed in the last decade and the method that used in analyzing data is a qualitative method. In this letter, the author uses the concept of Military Security (Galbreath and Deni) and Maritime Security (Lutz Feldt) as a basis for conducting an analysis of existing problems. The results of this research show that through DCP Australia supports Timor-Leste significantly to ensure security and stability in the Timor Sea.*

Keyword: *military security; maritime security; Australia; Timor-Leste; Tiongkok*

Abstrak: Selama satu dekade terakhir antara Australia dan China memiliki ketegangan dalam hubungan, serta ditambahkan lagi dengan kedekatan China di Timor-Leste dalam bidang keamanan, khususnya keamanan laut di Laut Timor. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran bagi Australia bahwa China akan menjadi ancaman bagi kedua negara serta berpotensi menjadi *Sea Power* di masa depan yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas baik dalam kawasan maupun secara global. Selanjutnya masalah tersebutlah yang menjadi bahasan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana kerjasama *DCP* antara kedua negara terhadap intensitas kekuatan China di Laut Timor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Defence Cooperation Program* (*DCP*) yang dilakukan antara Australia dan Timor-Leste terkait intensitas kekuatan China di Laut Timor periode 2013-2022. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatif, di mana ingin menjelaskan *DCP* yang telah dikembangkan dalam satu dekade terakhir serta metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep keamanan militer (Galbreath dan Deni) dan keamanan maritim (Lutz Feldt) sebagai landasan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui *DCP* Australia mendukung Timor-Leste secara signifikan untuk menjamin keamanan dan stabilitas di Laut Timor.

Kata Kunci: Australia; keamanan maritim; keamanan militer; Timor-Leste; Tiongkok

PENDAHULUAN

Salah satu bidang dasar yang sangat penting bagi sebuah negara untuk menjamin kedaulatannya yang berkelanjutan maka badan pertahanan nasionalnya perlu dipenuhi. Seperti yang dikemukakan oleh Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *“People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations”*, yang dalam pengantarnya menyatakan bahwa “Sepanjang sejarah masing-masing negara telah dibuat tidak aman oleh keberadaan yang lain, dan tindakan masing-masing negara dalam mengejar keamanan nasionalnya sendiri sering digabungkan dengan tindakan pihak lain untuk menghasilkan perang dan ancaman yang paling mungkin bagi kelangsungan spesies kita dikarenakan masalah keamanan nasional terletak pada akar perang, sehingga sangat penting untuk menanganinya” (Buzan, 1983). Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa sebuah negara tidak dapat menjamin keamanan bagi masyarakatnya dari ancaman luar tanpa memiliki suatu lembaga pertahanan yang secara struktur memiliki strategi pertahanan yang mapan.

Timor-Leste yang tergolong masih baru dalam meraih kemerdekaannya dan ditambah pula dengan baru terlepas dari koloni Portugis di tahun 1974 dan pendudukan Republik Indonesia pada tahun 1999, sangatlah pasti memiliki keterbatasan-keterbatasan lebih khususnya keterbatasan sumber daya manusia dan tenaga ahli dalam membangun badan pertahanan nasionalnya. Keterbatasan dalam badan pertahanan nasional yang dimiliki oleh Timor-Leste, sangat berpotensi terjadinya aktivitas-aktivitas kejahatan baik keamanan tradisional maupun keamanan non-tradisional. Timor-Leste sebagai negara yang secara teritorial memiliki tiga pulau yang tentunya memiliki teritorial laut. Sehingga secara terpadu harus mengkonsolidasikan keamanan maritim untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Laut Timor (*Mar de Timor*) merupakan kawasan perairan yang secara teknis juga merupakan perpanjangan dari samudera Hindia, berada di sebelah tenggara pulau Timor, yang secara geografis terletak di wilayah teritorial Timor-Leste dan berbatasan dengan perairan Indonesia yakni dengan laut Arafura di sebelah timur, meskipun sampai saat ini belum ada perjanjian yang menentukan batas teritorial laut yang permanen sesuai tapal batas antara kedua negara. Laut Timor juga berbatasan langsung dengan negara Australia yaitu dengan perairan pulau Melville dan kepulauan Ashmore dan Cartier di sebelah selatan, berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian batas laut permanen antara Timor-Leste dan Australia (Australian Government, 2018). Serta Laut Timor berbatasan dengan Samudra Hindia itu sendiri di sebelah barat.

Menurut Jun Suzuki-San seorang wartawan terkenal dari Jepang menyatakan bahwa Laut Timor berada di titik strategis geopolitik, dimana sebagai penghubung antara Samudra Pasifik dan Samudera Hindia, yang dapat meningkatkan kehadiran negara lain tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara militer (Embassy, 2017). Dari strategi geopolitik tersebut, dapat dikatakan bahwa keamanan terkait Laut Timor sangatlah penting untuk diperhatikan karena adanya persepsi tentang masalah keamanan bahwa adanya ancaman dari negara lain serta kekhawatiran terhadap kekuatan militer antar negara. Dimana mengingat bahwa negara perlu memiliki kemampuan dan kekuatan yang cukup mapan untuk menangkal segala bentuk ancaman yang mengganggu kestabilan keamanan maritim (Edrian, 2017).

Melihat pada kondisi strategis geopolitik di Laut Timor, menjadi perhatian khusus bagi Australia dengan beranggapan bahwa Timor-Leste yang masih dikategorikan memiliki kemampuan yang kurang dalam menjamin keamanan nasionalnya, dapat dimanfaatkan oleh

negara lain yang akhirnya menjadi ancaman bagi Australia, serta menjadi peluang bagi meningkatnya kekuatan asing di kawasan tersebut. Sehingga mendorong Timor-Leste dan Australia perlu melakukan kerjasama di bidang Pertahanan untuk meningkatkan Pertahanan Nasional Timor-Leste. Sedangkan Timor-Leste sendiri dengan kondisi strategis geopolitik dari Laut Timor menginginkan kawasan yang stabil dan aman. Sehingga penting bagi Timor-Leste untuk melakukan kerjasama dengan beberapa negara terutama negara tetangga seperti Australia dan Indonesia serta beberapa negara di luar kawasan seperti China dan Amerika Serikat serta beberapa negara lain untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam menjalin hubungan kerjasama, Timor-Leste berpegang pada kebijakan luar negerinya yang memprioritaskan hubungan kerjasama dengan negara tetangga dan negara lain di kawasan tersebut, dimana telah dikukuhkan dalam konstitusi Timor-Leste sendiri bahwa Republik Demokratik Timor-Leste akan memelihara ikatan persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan negara-negara kawasan (Tribunal de Rekurso, 2010).

Selain itu, melihat pada strategi geopolitik Laut Timor tersebut juga sebagai pendorong terjalannya hubungan kerjasama keamanan antara Timor-Leste dan China. Dimana Timor-Leste merupakan negara baru yang tentunya menginginkan peningkatan profesionalitas militernya. Hal tersebut disampaikan menteri muda pertahanan Timor-Leste, Julio Tomas Pinto saat diwawancarai oleh Mark Davis seorang jurnalis dari media *Radio News Australia* (Journeyman.TV, 2011). Menteri muda tersebut menyampaikan bahwa sebagai negara baru perlu belajar dari negara-negara besar yang memiliki pengalaman, ucapan tersebut tentu mengarah juga kepada China. Julio Tomas Pinto juga menyampaikan bahwa China bersedia membantu militer Timor-Leste dalam segala hal tergantung dari pihak Timor-Leste memintanya. Dimana melihat juga pada profesionalisme yang dimiliki militer Timor-Leste tidak sebanding dengan China.

Kerjasama pertahanan militer Timor-Leste dan Tiongkok dalam meningkatkan profesionalisme F-FDITL (FALINTIL-Força Defesa Timor Leste) dipicu oleh faktor kebutuhan domestik yakni perlengkapan militer untuk mengejar strategi pertahanan menuju *Força 2020* yang telah dirancang pada tahun 2005, dengan prioritas utamanya adalah pertahanan laut karena laut adalah masa depan Timor-Leste (*O mar é o futuro de Timor-Leste*). Sehingga pemerintah berupaya meningkatkan jumlah alutsista militernya. Dalam program pemerintahan yang mengedepankan pertahanan laut, sehingga negara yang diajak bekerja sama memiliki kemampuan pertahanan laut yang kuat. Hal tersebut diperjelas dengan kerjasama yang dibangun antara Timor-Leste dan Tiongkok pada sektor pertahanan militer. Dalam kerjasama yang dibangun antara kedua Negara, Republik Tiongkok telah mendanai pembangunan istana kepresidenan di Dili, kementerian luar negeri, dan markas besar pertahanan Timor-Leste pada tahun 2010. Pada tanggal 24 Agustus 2010, Timor-Leste menandatangani kontrak dengan Tiongkok untuk mendanai Markas Besar pertahanan senilai US\$ 9 juta. Selain itu juga Cina telah membayar untuk gedung-gedung besar lainnya di Timor-Leste, termasuk kedua gedung diatas dan markas besar serta perumahan militer (Everingham, 2010).

Sebelumnya, pada tahun 2008 terdapat pula kerjasama militer antara Timor-Leste dan Republik Tiongkok melalui diadakannya pembelian dua kapal patroli dari perusahaan Tiongkok yang merupakan lanjutan dari penandatanganan perjanjian pembelian peralatan alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) untuk meningkatkan perlengkapan angkatan

bersenjata di bulan April tahun yang sama. Dua kapal patroli Angkatan laut kelas Shanghai berbobot 175 ton sepanjang 43 meter yang dipasang Meriam 30 mm, buatan China yang dirancang tahun 1960-an telah tiba di Timor-Leste pada saat hubungan yang tegang antara pemerintah koalisi empat partai di Dili yang dipimpin oleh mantan pejuang gerilya, Xanana Gusmao. Timor Leste membeli kapal dari sebuah perusahaan Tiongkok pada tahun 2008 tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Australia, yang telah menempatkan ratusan tentara di negara itu sejak tahun 2006.

Dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan bentuk kerjasama di bidang pertahanan antara Timor-Leste dan Australia dalam sepuluh tahun terakhir untuk menjamin keamanan dan stabilitas di Laut Timor. Hal tersebut dilakukan karena hubungan kerjasama keamanan bilateral yang dibangun antara Timor-Leste dan Tiongkok, Australia melihat bahwa kedekatan Tiongkok di kawasan tersebut yang menjadi kekhawatiran bagi Australia sebagai peluang atau berpotensi meningkatnya kekuatan asing di masa yang akan datang, juga akan menjadi ancaman bagi Australia dan dapat memicu ketidakstabilan kawasan tersebut. Sehingga melihat pada isu yang ada tersebut, dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan mendasar yakni Bagaimana Program Kerjasama Pertahanan antara Australia dan Timor-Leste selama sepuluh tahun terakhir (2013-2022), terkait intensitas kedekatan Pertahanan China di Laut Timor? Maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta mencari makna dari kerjasama pertahanan antara Australia dan Timor-Leste melalui *Defence Cooperation Program (DCP)* periode 2013-2022, dalam konteks meningkatkan kualitas dan kemampuan militer yang profesional dalam menjamin keamanan maritime (*Maritime Security*) di Laut Timor secara nasional dan regional.

KAJIAN PUSTAKA

Galbreath dan Deni memperkenalkan beberapa keunggulan dalam menjamin keamanan militer, yakni anggaran pertahanan, pengadaan pertahanan, perekrutan dan retensi untuk mempertahankan kekuatan militer sukarela, pendidikan militer profesional, logistik militer, doktrin militer, strategi, budaya pertahanan strategis antara kekuatan dan aturan, hubungan sipil-militer serta operasi gabungan bersama (Pungetti, 2022). Namun pada penelitian ini, penulis akan mengambil beberapa pola untuk melihat hubungan kerjasama pertahanan yang dibangun antara Timor-Leste dan Australia dalam meningkatkan keamanan militer melalui *Defence Cooperation Program*, yaitu:

1. Pendidikan Militer Profesional (*Professional Military Education*), sebagai sarana untuk menciptakan keterampilan praktis dan teknis dasar yang diperlukan untuk menopang militer berfungsi, yang umumnya berorientasi pada spesialisasi militer tertentu;
2. Operasi Gabungan Bersama (*Joint Combined Operations*), merupakan operasi yang mencakup dua atau lebih dari dinas militer di bawah satu komando untuk mencapai tujuan kebijakan pertahanan. Dalam peningkatan kemampuan pasukan darat, laut, udara, ruang angkasa, dan dunia maya membutuhkan kontrol yang lebih terkoordinasi berkaitan dengan strategi pertahanan;
3. Pengadaan dan Logistik Militer (*Military Logistic and Procurement*), sistem logistik dan pengadaan yang efektif harus mengarahkan sumber daya yang melimpah untuk memastikan pertempuran, elemen pendukung akan dapat menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai efek operasional yang diinginkan; serta setiap negara

berinvestasi dalam kemampuan dan layanan militer untuk memungkinkan militer mereka membela diri, atau jika perlu, untuk memungkinkan mereka menggunakan kekuatan melawan negara lain.

Selain konsep keamanan militer, penulis juga menggunakan konsep keamanan maritim yang diperkenalkan oleh Lutz Feldt. Dimana menurut Feldt bahwa *maritime security* merupakan kombinasi langkah pencegahan dan responsif untuk melindungi domain maritim dari ancaman dan tindakan ilegal (Lutz et al., 2013). Dalam pengertiannya, menunjukkan bahwa upaya preventif dan responsif diperlukan untuk menegakkan hukum baik sipil maupun militer serta operasi pertahanan yang dilakukan angkatan laut. Isu-isu yang diperhatikan juga terutama meliputi keselamatan navigasi, pemberantasan kejahatan transnasional termasuk didalamnya adalah isu terorisme maritim dan pembajakan laut, serta pencegahan dan penyelesaian konflik.

Selanjutnya Lutz Feldt juga memperkenalkan beberapa elemen dalam keamanan laut, yaitu menginginkan perdamaian dan keamanan nasional serta internasional; kedaulatan, integritas dan kemerdekaan politik; keamanan jalur komunikasi laut; perlindungan keamanan dari kejahatan di laut; keamanan sumber daya, akses ke sumber daya di laut dan ke dasar laut; perlindungan lingkungan; keamanan semua pelaut dan nelayan (Lutz et al., 2013). Namun dalam penelitian ini penulis lebih fokus melihat pada elemen perdamaian dan keamanan secara nasional dan internasional, serta kedaulatan, integritas dan kemerdekaan politik. Sehingga untuk menjamin kedua elemen tersebut memerlukan keamanan militer yang mapan yang mana merupakan fitur utama dalam keamanan nasional.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Dimana dalam metode penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini untuk mendapatkan makna secara objektif. Pendekatan kualitatif melihat dari karakter atau ciri khasnya juga lebih memperhatikan proses pengumpulan variabel, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang terjadi antara satu sama lain. selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai penunjang penelitian seperti: jurnal, buku, situs resmi, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang telah ditentukan.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian berupa studi kasus yang mana lebih memfokuskan untuk analisis kerjasama yang dilakukan antara Australia dan Timor-Leste dalam bidang keamanan khususnya keamanan laut di Laut Timor melalui Program Kerjasama Pertahanan (*Defence Cooperation Program/DCP*), yang mencakup kerjasama kedua negara untuk menjamin keamanan laut di Laut Timor yang berkelanjutan dan analisis mendalam terhadap kerjasama yang dilakukan antara kedua negara untuk lebih mempersiapkan diri atau melakukan tindakan preventif dalam menghadapi ancaman dan dampak yang bisa merugikan kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yang telah penulis cantumkan, digunakan untuk mendeskripsikan serta mencari makna bagaimana kerjasama pertahanan yang dilakukan antara Australia dan Timor-Leste melalui *Defence Cooperation Program (DCP)* dalam periode sepuluh

tahun terakhir (2013-2022) terkait kedekatan pertahanan China di Laut Timor. Hasil yang didapat serta pembahasan dalam penelitian ini dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Kerjasama Pertahanan Australia dan Timor-Leste Dalam Meningkatkan Keamanan Militer *Falintil – Forca Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)*

Pemerintah Australia telah merencanakan program untuk memperkuat fondasi pertahanan Australia dalam waktu jangka panjang untuk membangun Angkatan Pertahanan di tahun 2030, agar siap menghadapi tantangan masa depan. Kekuatan tersebut dinamakan dengan *Force 2030*, sebagai *Defending Australia in the Asia-Pacific Century* yang dipublikasikan melalui *Australia Defence White Paper 2009* (Mukrimaa et al., 2016). Dalam perencanaan tersebut, pemerintah Australia banyak berinvestasi tiap tahunnya untuk mengembangkan Angkatan Pertahanan mereka (*Australia Defence Force / ADF*) dengan harapan dapat memiliki kemampuan dalam mempertahankan kredibilitas dan berkontribusi bagi keamanan negara Australia serta mitra dan negara tetangganya melalui pencegahan pergerakan musuh yang berpotensi menggunakan kekerasan di lingkungan Asia-Pasifik.

Disamping itu juga, pemerintah Timor-Leste sendiri memiliki perencanaan secara menyeluruh pada berbagai aspek, baik aspek politik dan keamanan, ekonomi, maupun aspek sosial-budaya. Namun, dalam penulisan kali ini penulis ingin memperlihatkan aspek keamanan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dengan menyajikan kebijakan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pertahanan negara Timor-Leste sendiri. Sehingga pada April 2010, Timor-Leste merilis Rencana Pembangunan Strategi Timor-Leste 2011-2030 (*Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Timor-Leste 2011-2030*) (GoTL SDP, 2011). Rencana tersebut merupakan paket kebijakan strategis yang diimplementasikan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam perencanaan pembangunan strategis ini, pada bagian *Institutional Framework of Defence* menunjukkan bahwa Timor-Leste menginginkan Angkatan Pertahanan Timor-Leste (*FALINTIL-Forca da Defesa Timor-Leste / F-FDTL*) yang netral, profesional terhadap semua negara, untuk melindungi kedaulatan serta mendukung Polisi Nasional Timor-Leste (*Policia Nacional de Timor-Leste / PNTL*) agar menjamin stabilitas dan perdamaian negara.

Dalam menjamin keamanan militer, melalui Program Kerjasama Pertahanan yang dilakukan antara Australia dan Timor-Leste dalam sepuluh tahun terakhir, telah dilakukannya beberapa pola untuk meningkatkan keamanan dalam menjamin keamanan nasional, yakni pendidikan militer profesional, operasi gabungan bersama, serta pengadaan dan logistik militer. Kerjasama sama tersebut dimulai dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian yang dikenal dengan *Defence Cooperation Talk (DCT)* pada tahun 4 September 2013 antara Direktorat Jenderal Sekretaris Negara Urusan Pertahanan (*Diretor Geral Secretario do Estado da Defesa*) Timor-Leste, Joao de Corte-Real dan Asisten I Sekretariat Kebijakan Internasional Australia, Neil Orme, yang mencakup bidang-bidang seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kerjasama maritim (GoTL, 2013).

Sehingga pada tahun 2014, Angkatan Laut Australia memberikan pelatihan maritim untuk F-FDTL. Kapal perang HMAS Huon-M82 mengunjungi Dili, Timor-Leste, dari tanggal 11-15 Desember 2014, untuk melakukan pelatihan maritim dengan Komponen Angkatan Laut Angkatan Pertahanan Timor-Leste (F-FDTL) sebagai bagian dari hubungan pertahanan bilateral yang erat antara kedua negara. Melalui Program Kerjasama Pertahanan, kapal HMAS

Huon-M82 membawa 13 anggota F-FDTL untuk berbagi keahlian di bidang pelayaran, penyelaman, pengendalian kerusakan, pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan keselamatan, serta keterampilan pelatihan teknik di Pelabuhan Dili, Timor-Leste. Program ini bertujuan untuk membangun kapasitas di dalam F-FDTL dan Sekretariat Negara untuk Pertahanan agar negara dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan keamanannya, serta kepentingan keamanan maritim guna memastikan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera (Embassy, 2014).

Begitu juga, dalam *Australia Defense White Paper 2016*, menunjukkan peningkatan kekuatan maritim dan kemampuan Amfibi ADF akan memiliki lebih banyak kapabilitas dan lebih responsif serta fleksibel dalam memberikan bantuan secara bilateral melalui Program Kerjasama Pertahanan kepada Timor-Leste sebagai negara tetangga. Dimana penyediaan kapal patroli yang dikhususkan untuk Timor-Leste, pada tahun 2017 antara Pemerintah Australia oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan Pemerintah Timor-Leste oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri, mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut. Perdana Menteri Turnbull mengumumkan bahwa Timor-Leste telah menerima tawaran dua kapal dari Canberra untuk melakukan patroli di perairan Timor-Leste, sambil menyebutkan kesepakatan penyelesaian sengketa tentang perbatasan laut antara kedua negara yang akan dilakukan melalui program membangun kapal patroli Pasifik baru (AUSTAL, 2021). Penerimaan tawaran dua kapal tersebut dari pemerintah Australia ditunjukkan melalui pernyataan Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri bahwa Timor-Leste sangat mengapresiasi tawaran dari pemerintah Australia dan merupakan peluang besar sehingga berkomitmen dalam mempertahankan serta akan melakukan yang terbaik dalam menyepakati berbagi perbatasan bersama (Noticia, 2017). Sehingga dalam penyediaan tersebut Timor-Leste akan menerima dua kapal patroli di tahun 2023 (Ministers, 2018).

Selain menyediakan kapal patroli, Pemerintah Australia dan Pemerintah Timor-Leste juga menyepakati untuk membangun kembali Pelabuhan Angkatan Laut bagi Timor-Leste. Dimana dalam pertemuan resmi yang diadakan di Kementerian Pertahanan Dili pada tahun 2021 antara Menteri Pertahanan Timor-Leste, Filomeno Paixao, dan Dubes Australia untuk Timor-Leste, Peter Roberts, melakukan penandatanganan kesepakatan untuk membangun kembali Pelabuhan Angkatan Laut Hera (Moniz, 2021). Hal tersebut merupakan lanjutan dari pemerintah Australia yang menjanjikan akan membangun pangkalan Angkatan Laut bagi Timor-Leste. Dimana pada Agustus 2019, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, melakukan kunjungan ke Timor-Leste dengan tujuan untuk bertukar catatan diplomatik terkait penyelesaian batas maritim yang baru antara kedua negara, serta menyepakati pembagian pendapatan minyak dan gas Timor-Leste. Dalam kunjungannya yang bertepatan dengan peringatan 20 tahun kemerdekaan Timor-Leste, Morrison menyatakan bahwa hal ini merupakan babak baru bagi relasi Australia dan Timor-Leste yang didasari pada rasa saling menghormati, kesamaan nilai, dan kepentingan antara kedua negara (Cnnindonesia, 2019). Selain itu, Morrison juga menambahkan bahwa Australia berkomitmen untuk menanamkan modal dalam pembangunan dermaga baru di Pangkalan Angkatan Laut Hera, yang terletak di pantai utara Timor-Leste. Sehingga Timor-Leste bisa mengoperasikan dua kapal patroli kelas Guardian hibah dari Australia yang secara resmi akan diberikan pada tahun 2023 mendatang.

Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2022, pertemuan antara Filomeno dan William membahas kerjasama pertahanan dan *Status of Forces Agreement (SOFA)*. Dalam pertemuan

tersebut membahas tentang pelatihan teknis untuk 60 anggota *F-FDTL* dalam mengoperasikan dua kapal patroli yang akan diberikan Australia di tahun depan agar dapat mengontrol wilayah maritimnya secara penuh. Dalam Program Kerjasama Pertahanan (*DCP*), *Australian Defence Force Academy*, *Australian Defence College*, serta *Royal Military College-Duntroon* juga telah membantu *F-FDTL* untuk mengembangkan kemampuan operasi perdamaian dengan memberikan pelatihan spesialis di Timor-Leste dan Australia, mendukung Pusat Pelatihan Operasi Perdamaian *F-FDTL* untuk mencapai akreditasi PBB dan memfasilitasi peluang bagi *F-FDTL* untuk belajar praktik internasional terbaik di seminar operasi perdamaian. Salah satu elemen unggulan dalam *DCP* tersebut adalah program Bahasa Inggris, dimana sekitar 30% dari *F-FDTL* telah menerima pelatihan bahasa yang disponsori oleh *DCP* dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan yang dilakukan di Australia maupun di Timor-Leste (Moniz, 2022b).

Mobile Training Team - Alpha (MTT-A) Angkatan Darat Australia melakukan latihan perang dengan *F-FDTL* guna memperkuat hubungan Australia dengan Timor-Leste di bidang pertahanan. Dalam rangkaian keterlibatan internasional tahun 2022 di Timor-Leste, Tim Pelatihan Keliling Pertama (*MTT-A*) Australia merupakan bagian dari dukungan Angkatan Darat Australia kepada Angkatan Pertahanan Timor-Leste (*F-FDTL*) melalui Program Kerjasama Pertahanan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pelatihan dasar insinyur tempur, pertolongan pertama dan logistik, serta telah merancang dan menyelenggarakan kursus pelatihan pengoperasian dasar bagi *F-FDTL* tentang jaringan komputer dan melakukan pemeliharaan transmisi dan pemulihan infrastruktur (Sape, 2022).

ADF melatih dan memberi dukungan kepada *F-FDTL*, dan sebaliknya *F-FDTL* membantu dalam memperkenalkan negara Timor-Leste dan kondisi wilayah bagian utara Australia (Kondisi Laut Timor). Bagi Australia sendiri, menurut Mayor Mandl manfaat dari bekerja sama dengan *F-FDTL* dalam pelatihan tersebut diatas merupakan kesempatan yang sangat baik bagi personel *ADF* untuk mengalami bagaimana beroperasi di lingkungan yang terbatas. Keterbatasan dalam arti medan yang sulit, infrastruktur dan konektivitas yang terbatas, rantai pasokan yang menantang, serta hambatan bahasa. Dimana diperlukannya penutur bahasa Tetun dan Portugis untuk mengatasi hambatan bahasa, sehingga sangat penting dalam menyebarkan program *MTT-A* dengan efektif, dan pengetahuan bahasa merupakan peningkatan interoperabilitas tentara *ADF*.

Mayor Mandl juga melihat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara kekuatan secara individu, dimana telah terjadinya perkembangan dalam diri masing-masing anggota kedua institusi tersebut dalam mendobrak hambatan bahasa dan tantangan lainnya. Menurut Mayor Mandl bahwa *MTT-A* memberikan dukungan kepada Program Kerjasama Pertahanan merupakan kunci keberhasilan di Timor-Leste. Dimana hubungan infanteri dan insinyur antara *ADF* dan *F-FDTL* sudah sangat terjalin melalui logistik yang berperan penting dalam konflik dan peluang besar untuk meningkatkan pendampingan yang ada dengan keterlibatan yang terfokus mengenai dukungan layanan tempur dan logistik untuk *F-FDTL*.

Menteri Pertahanan Timor-Leste, Filomeno Paixão dan Duta Besar Australia untuk Timor-Leste, William Costello membahas kerjasama maritim dan pembangunan infrastruktur untuk angkatan bersenjata Timor-Leste yakni *F-FDTL* (Moniz, 2022a). Pada tanggal 14 Maret 2022, pertemuan antara Filomeno dan William membahas kerjasama pertahanan dan *Status of Forces Agreement (SOFA)* tentang pelatihan teknis untuk 60 anggota *F-FDTL* dalam

mengoperasikan dua kapal patroli yang akan diberikan Australia di tahun depan agar dapat mengontrol wilayah maritimnya secara penuh, dan juga membahas tentang pembangunan Pelabuhan Hera disertakan dengan pelatihan kepada F-FDTL dalam menghadapi bencana alam. William juga mengatakan bahwa pemerintah Australia berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan di bidang pertahanan dengan Timor-Leste termasuk design kerjasama dalam membangun Gedung F-FDTL baru.

Kerjasama Pertahanan Australia dan Timor-Leste Sebagai Tindakan Responsif dan Pencegahan Terhadap Ancaman Keamanan Maritim di Laut Timor

Berhubungan dengan konteks Laut Timor yang merupakan perbatasan langsung antara Australia dan Timor-Leste, pemerintah Australia melihat bahwa kedekatan Tiongkok di Timor-Leste akan menjadi ancaman di masa depan, yang mana kedekatan tersebut berpotensi menjadi *Sea Power* di Laut Timor. Hal tersebut terlihat melalui kerjasama yang dibangun antara pemerintah Tiongkok dan pemerintah Timor-Leste dalam bidang pertahanan, sejak awal kemerdekaan Timor-Leste hingga sekarang. Seperti pada tahun 2010 China mengalokasikan dana sebanyak US\$ 9 juta, untuk membangun Istana Kepresidenan, gedung Kementerian Pertahanan Timor-Leste dan Markas Besar F-FDTL serta perumahan bagi Anggota (Evingham, 2010). Terkait pengadaan dan logistik militer F-FDTL, China juga memberikan transportasi untuk F-FDTL seperti Jeep, dan juga kostum militer, serta yang lebih dikhawatirkan oleh Australia adalah Timor-Leste membeli dua kapal patroli dari China yang diikuti dengan personil pengoperasian kapal dari Angkatan Laut China pada tahun 2008. Selanjutnya adapun pelatihan-pelatihan dan pendidikan militer yang dilakukan antara China dan Timor-Leste.

Tiongkok melancarkan kerjasama tersebut dengan melihat bahwa ancaman dan peluang yang saat ini dihadapi oleh negara Tiongkok sebagai *maritime power* di kawasan Asia Pasifik, mereka memperlancarkan strategi pertahanan maritimnya yang optimal, yang disusun dalam tiga bagian utama yaitu: *pertama*, Tiongkok harus menjamin keamanan provinsi pesisir mereka karena dampaknya terhadap solvabilitas ekonomi Tiongkok, serta akses yang mereka berikan pada jantung Tiongkok. *Kedua*, Tiongkok haru melindungi stabilitas maritim regionalnya menjamin kelanjutan akses pasar Tiongkok dengan apa yang mereka sebut sebagai Naga dan Macan Asia. *Ketiga*, Tiongkok sebaiknya mengembangkan kekuatan dan memproyeksi kekuatannya yang cukup untuk menjamin Tiongkok jalur laut yang menghubungkan pelabuhan Tiongkok dengan sumber impor minyak di luar negeri (Slominski, 2022). Sehingga penulis melihat bahwa strategi pertahanan Tiongkok yang optimal pada bagian ketiga inilah yang menjadi cikal bakal kekhawatiran bagi Australia, bahwa Tiongkok akan berpotensi menjadi ancaman di Laut Timor dengan intensitas kekuatan mereka yang kembangkan.

Ditambah juga dengan melihat pada ketegangan hubungan antara Australia dan Tiongkok selama sepuluh tahun terakhir, dimana Australia yang sebelumnya memainkan kebijakannya sebagai *The Hedging State*, kini nampak keberpihakan Australia kepada Amerika Serikat yang sangat kentara dalam kompetisi militer dengan Tiongkok. Hal tersebut terlihat melalui keberpihakan Australia mendukung Amerika Serikat dalam kasus *China Air Defence Identification Zone (CADIZ)* di tahun 2013, dimana Australia dan Amerika Serikat sama-sama mendukung Jepang dalam menolak deklarasi sepihak Tiongkok terkait perluasan zona

pertahanan udara atas perairan dan pulau-pulau yang disengketakan Jepang dan Tiongkok (Kenny & Wen, 2013). Selanjutnya, pada tahun 2016 Australia menentang *Nine-dash Line Map* Tiongkok di Laut Cina Selatan, setelah menyusul keputusan pengadilan internasional yang menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki hak historis atas Laut Cina Selatan berdasarkan peta "*Nine-Dash Line*" (Talmon, 2023).

Selanjutnya ketegangan Australia dan Tiongkok juga muncul akibat pembelian kapal selam nuklir oleh Australia dalam kerjasama AUKUS pada tahun 2021, dimana menurut Tiongkok bahwa hal tersebut akan sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional, memperburuk perlombaan senjata dan merusak perjanjian nonproliferasi nuklir internasional, dan ini merupakan tindakan yang sama sekali tidak bertanggung jawab (Sanger & Kanno-Youngs, 2021). Ketegangan lain yang ada, yaitu pada tahun 2022 Tiongkok dan Solomon Island menandatangani perjanjian pakta pertahanan Sino-Salomon, dimana Pejabat senior Australia termasuk PM Morrison, Menteri Pertahanan Peter Dutton, dan Menteri Luar Negeri Marise Payne menyatakan keprihatinan tentang perluasan pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan, yang dianggap Australia sebagai "*Backyard*" (Aljazeera, 2022).

Disamping itu juga, kehadiran Angkatan Laut Tiongkok di Timor-Leste dengan tiga kapal perang yang terdiri dari kapal perusak "Jinan", kapal fregat "Yiyang" dan kapal Suplai "Qiandao Hu" di Timor-Leste (GoTL, 2016), serta menghubungkan dengan geostrategis dari Laut Timor yang mana merupakan salah satu jalur penghubung antara samudra Pasifik dan samudra Hindia, sangatlah tidak mungkin menjadi target Tiongkok untuk melancarkan strategi pertahanan maritimnya di kawasan tersebut. Sehingga menjadi semakin meyakinkan kekhawatiran Australia bahwa akan menjadi ancaman di masa depan bagi negara disekitar seperti Australia yang takut akan menurunkan tingkat kualitas hidup penduduk. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Ulman bahwa ancaman merupakan suatu keadaan yang secara cepat dapat menurunkan tingkat kualitas hidup penduduk di suatu negara (Kasekamp, 2005).

Dalam melakukan analisis mengenai Program Kerjasama Pertahanan yang dibangun antara Australia dan Timor-Leste terkait adanya intensitas kekuatan China di Laut Timor, penulis menggunakan konsep keamanan maritim (*maritime security*) untuk melihat makna dari kerjasama yang ada. Dalam konsep *maritime security* untuk menjamin keamanan laut di Laut Timor sebagai domain maritim, perlu adanya suatu tindakan pencegahan dan responsif. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Lutz Feld dalam mendefinisikan *maritime security* sebagai kombinasi langkah pencegahan dan responsif untuk melindungi maritim dari ancaman dan tindakan ilegal (Lutz et al., 2013).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas tentang kerjasama pertahanan yang dilakukan antara Australia dan Timor-Leste melalui *Defence Cooperation Program (DCP)* dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2022), dengan menggunakan dua konsep keamanan, yakni keamanan militer yang mengacu pada pandangan *Galbreath* dan *Deni*, serta keamanan maritim yang mengacu pada pandangan Lutz Feldt dan kawan-kawanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui kerjasama tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas yang professional Angkatan Pertahanan Timor-Leste (*F-FDTL*) yang telah dirumuskan dalam *Strategic Development Plan Timor-Leste 2011-2030* khususnya pada sektor pertahanan, dan juga dalam kerjasama tersebut sebagai kombinasi dari tindakan responsif dan

preventif terhadap intensitas kekuatan Tiongkok yang dikhawatirkan berpotensi ancaman terbentuknya *Sea Power* guna menjamin keamanan maritim di Laut Timor agar dapat menyumbangkan perdamaian dan stabilitas secara nasional, regional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. (2022). *Australia alarm over China security deal with Solomon Islands*. Al Zaeera News. <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/25/australia-alarm-over-china-security-deal-with-solomon-islands>
- AUSTAL. (2021). *Angkatan Laut Timor Leste Terima 2 Kapal Perang Baru*. <https://www.youtube.com/watch?v=bI-iljZII8Q>
- Australian Government. (2018). *Australia and Timor-Leste Maritime Boundaries Rules-Based Order in Action*. March.
- Buzan, B. (1983). People State and Fear. In *An Agenda for International Security Studies in the Post ...* (Vol. 24, Issue 2, pp. 243–249). https://scholar.google.co.uk/scholar?q=Buzan+1991&btnG=&hl=de&as_sdt=0%2C5#2
- Cnnindonesia. (2019). *Australia Janji Bangun Pangkalan AL dan Internet Timor Leste*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190830174925-113-426199/australia-janji-bangun-pangkalan-al-dan-internet-timor-leste>
- Edrian, M. (2017). Melihat Keamanan Maritim Indonesia Dari Ide Poros Maritim. *Defendonesia*, 2(2), 17–24. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v2i2.60>
- Embassy, A. (2014). *Australian Navy provides maritime training for F-FDTL*. Australia Embassy. <https://timorleste.embassy.gov.au/dili/074.html>
- Embassy, A. (2017). *Defence Co-operation*. Australia Embassy. <https://timorleste.embassy.gov.au/dili/Defence.html>
- Everingham, S. (2010). *China, East Timor strengthen military ties*. ABC News. <https://www.abc.net.au/news/2010-08-24/china-east-timor-strengthen-military-ties/956650>
- GoTL. (2013). *Timor-Leste and Australia Strengthen Military Cooperation*. Government of Timor-Leste. <http://timor-leste.gov.tl/?p=8872&lang=en>
- GoTL. (2016). *Chinese Navy Visit Concludes*. GoTL. <http://timor-leste.gov.tl/?p=14345&lang=en>
- GoTL SDP. (2011). *Timor-Leste Strategic Development Plan 2011 - 2030*. *Sdp*, 228. <http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2011/07/Timor-Leste-Strategic-Plan-2011-20301.pdf>
- Journeyman.TV. (2011). *East Timor Is Caught In A Tug Of War Between Australia And China*.
- Kasekamp, A. (2005). *The Estonian Foreign Policy Yearbook*.
- Kenny, M., & Wen, P. (2013). *Tony Abbot Refuses To Back Down Over China Comments*. The Sydney Morning Herald. <https://www.smh.com.au/politics/federal/tony-abbott-refuses-to-back-down-over-china-comments-20131128-2ydw1.html>
- Lutz, F., Roel, D. P., & D. Thiele, R. (2013). *Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*. *ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security*, 49(222), 1–25.
- Ministers, D. (2018). *Joint Media Release - Minister for Defence and Minister for Defence Industry - 21 Pacific Patrol Boats to be built in WA*. Australia Government. <https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2018-04-19/joint-media-release-minister-defence-and-minister-defence-industry-21-pacific-patrol-boats-be-built-wa>
- Moniz, A. (2021). *Australia Akan Bantu Dua Kapal Patroli Untuk Timor-Leste*. Tatoli. <https://id.tatoli.tl/2021/08/13/australia-akan-bantu-dua-kapal-patroli-untuk-tl/#:~:text=DILI%2C%2013%20agustus%2021>

- Moniz, A. (2022a). *Timor-Leste dan Australia Babas Kerjasama Keamanan Maritim dan Infrastruktur F-FDTL*. Tatoli. <https://id.tatoli.tl/2022/03/14/timor-leste-dan-australia-bahas-kerjasama-keamanan-maritim-dan-infrastruktur-f-fdtl/>
- Moniz, A. (2022b). *Tingkatkan Kapasitas, Pasukan Angkatan Pertahanan Australia Siap Dukung F-FDTL*. Tatoli. <https://id.tatoli.tl/2022/08/19/tingkatkan-kapasitas-pasukan-angkatan-pertahanan-australia-siap-dukung-f-fdtl/>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Defending Australia in The Asia Pacific Century: Force 2030. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Noticia. (2017). *Australia PM Announces Agreement With Timor-Leste To Offer Ships*. East Timor Law and Justice Bulletin. <https://www.easttimorlawandjusticebulletin.com/2017/11/australian-pm-announces-agreement-with.html>
- Pungetti, G. (2022). Routledge Handbook of Seascapes. In *Routledge Handbook of Seascapes*. <https://doi.org/10.4324/9780429273452>
- Sanger, D. E., & Kanno-Youngs, Z. (2021). *Biden Announces Defense Deal With Australia in a Bid to Counter China*. New York Times. <https://www.nytimes.com/2021/09/15/us/politics/biden-australia-britain-china.html>
- Sape, A. (2022). *Insinyur Angkatan Darat Australia Latihan Perang dengan Tentara Timor Leste*. Pos-Kupang.Com. <https://kupang.tribunnews.com/2022/05/13/insinyur-angkatan-darat-australia-latihan-perang-dengan-tentara-timor-leste?page=all>
- Slominski, M. S. (2022). *CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Master ' s Thesis Technocratic-Populism in India :*
- Talmon, S. (2023). Beyond the South China Sea Arbitration. *The South China Sea Arbitration, July*, 334–378. https://doi.org/10.1163/9789004381193_006
- Tribunal de Rekurso. (2010). *República Democrática Timor-Leste nia Konstituisaun*. 1–62.